

SKRIPSI

**“EVALUASI TERHADAP KINERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN
(ULP) KOTA PALEMBANG”.**



Oleh:

Poltak M. Simamora

51081003098

Akuntansi

Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat

Guna Mencapai Gelar

Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2014

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
2014**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
EVALUASI TERHADAP KINERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
KOTA PALEMBANG**

Disusun oleh :

Nama : Poltak. M. Simamora

NIM : 51081003098

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Mata Kuliah : Akuntansi Sektor Publik

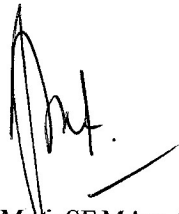
Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 21 Juni 2014 dan telah memenuhi syarat untuk diterima

Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 21 Juni 2014

Ketua

Anggota

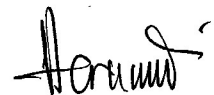
Anggota



Dr. Inten Meutia, SE, M.Acc., Ak., CA
NIP 196905261994032002

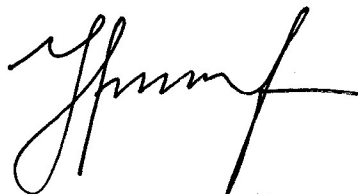


Ahmad Subeki, SE, MM., Ak., CA
NIP 196508161995121001



Drs. H. Harun Delamat, M.Si, Ak., CA
NIP 195501131990031002

Mengetahui
Ketua Jurusan



Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak., CA.
NIP 19650816 199512 1 001

PERFORMANCE EVALUATION OF PROCUREMENT SERVICES UNIT (ULP) PALEMBANG

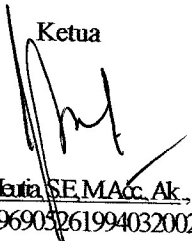
ABSTRACT

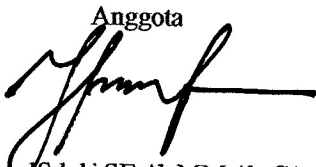
Research aims: (1) To determine the performance of the Procurement Services Unit (ULP) Palembang in terms of the effectiveness; (2) To determine the performance of the Procurement Services Unit (ULP) Palembang in terms of the efficiency. The scope of this study focused on the analysis and discussion of the performance evaluation is done through value for money. Issues to be discussed in terms of the efficiency and effectiveness of service programs the procurement of both goods and services in Palembang ULP.

The technique of collecting data through observation, questionnaires, interviews and dokument. Teknis data analysis is a quantitative analysis (Kuantitative Descriptive Analysis Method). Based on data analysis can be summarized as follows: (1) Performance Procurement Services Unit (ULP) Palembang in terms of effectiveness, including effective hand. However, these results have not been satisfactory public, because the objectives have not been realized 100% activity. (2) Performance Procurement Services Unit (ULP) Palembang in terms of the efficiency is very efficient. The percentage of the average efficiency ratio reached 100% and some even beyond ratio above 100%. This means also that the use of the budget for each activity can already be maximized to meet the physical attainment plan (output) in the field.

Key words: Evaluation, Performance Procurement Services Unit (ULP), Palembang.

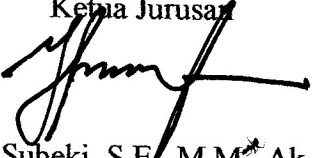
Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 21 Juni 2014

Ketua

Dr. Inten Maria, SE, MAcc, Ak., CA
NIP 196903261994032002

Anggota

Ahmad Subeki, SE, Ak, MM, Ak., CA
NIP 196508161995121001

Anggota

Drs. H. Hamid Dahmat, M.Si, Ak., CA
NIP 195501131990031002

Mengetahui
Ketua Jurusan

Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak., CA.
NIP 19650816 199512 1 001

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI PALEMBANG**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

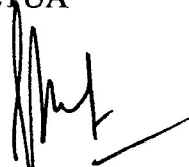
Nama : Poltak. M. Simamora
Nim : 51081003098
Jurusan : Akuntansi
Mata kuliah : Akuntansi Sektor Publik
Judul Sripsi : Evaluasi Terhadap Kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Palembang

**PEMBIMBING SKRIPSI
TANGGAL PERSETUJUAN**

Tanggal : ()

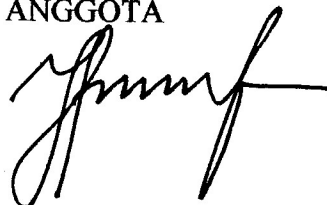
DOSEN PEMBIMBING

KETUA



Dr. Inten Meutia, S.E, M.Acc., Ak
NIP. 196905261994032002

ANGGOTA



Tanggal : ()

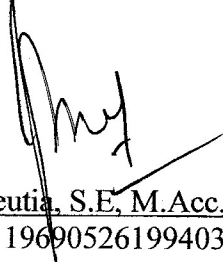
Ahmad Subeki S.E. Ak. M.M.
NIP. 196508161995121001

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Evaluasi Terhadap Kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Kota Palembang
Nama Mahasiswa : Poltak. M. Simamora
Nim : 51081003098
Program Studi : S1

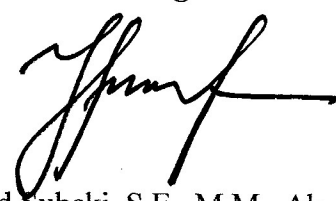
Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Inten Meutia, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 196905261994032002

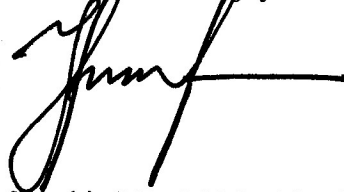
Pembimbing II



Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak., CA.
NIP. 196508161995121001

Ketua Jurusan Akuntansi

Universitas Sriwijaya



Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak., CA.
NIP 19650816 199512 1 001

Tanggal Lulus: 21 Juni 2014

Motto:

**“Kau yang membawa ketempat ini aku yakin dan percaya Kau yang telah membantu menyelesaikannya
Terima Kasih Tuhan.”**

Kupersembahkan untuk

- Bapak dan Mamak
- Bang Boy, Bang David,
Bang Edward
- Kak Evi, Lae, Abner, Titi
- Sahabat – sahabatku
- Kekasihku “Febri M.S”
- Almamaterku

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Poltak Manaek Simamora
Tempat/Tanggal Lahir : Medan/27 Juli 1985
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul :

Evaluasi Terhadap Kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Palembang

Pembimbing I : Dr. Inten Meutia, S.E, M.Acc., Ak., CA

Pembimbing II : Ahmad Subeki S.E, M.M, Ak, CA

Adalah benar karya ilmiah yang saya tulis ini adalah hasil karya yang saya buat sendiri dan tidak ada hasil karya orang lain yang saya salin keseluruhan atau sebagian tanpa menyebutkan sumber aslinya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi dengan peraturan, termasuk pembatalan gelar kesarjanaan saya.

Palembang, 21 Juni 2014

Yang membuat pernyataan



Poltak Manaek Simamora

NIM. 51081003098

EVALUASI TERHADAP KINERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KOTA PALEMBANG

ABSTRAKSI

Penelitian bertujuan: (1) Untuk mengetahui kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Palembang ditinjau dari sisi efektivitas; (2) Untuk mengetahui kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Palembang ditinjau dari sisi efisiensi. Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada analisis dan pembahasan mengenai evaluasi kinerja yang dilakukan melalui *value for money*. Permasalahan yang akan dibahas ditinjau dari sisi efisiensi dan efektivitas program layanan pengadaan baik barang maupun jasa di ULP Kota Palembang.

Teknik pengumpulan data melalui observasi, angket, wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif (*Descriptive Kuantitative Analysis Method*). Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Palembang ditinjau dari sisi efektivitas termasuk efektif. Namun hasil ini belum memuaskan publik, sebab tujuan sasaran kegiatan belum terealisasi 100%. (2) Kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Palembang ditinjau dari sisi efisiensi sangat efisien. Persentase rasio efisiensi rata-rata mencapai 100% bahkan ada yang melampau rasio di atas 100%. Hal ini berarti pula bahwa penggunaan anggaran pada setiap kegiatan sudah dapat dimaksimalkan untuk memenuhi rencana pencapaian fisik (*output*) di lapangan.

Kata Kunci: Evaluasi, Kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP), Kota Palembang.

PERFORMANCE EVALUATION OF PROCUREMENT SERVICES UNIT (ULP) PALEMBANG

ABSTRACT

Research aims: (1) To determine the performance of the Procurement Services Unit (ULP) Palembang in terms of the effectiveness; (2) To determine the performance of the Procurement Services Unit (ULP) Palembang in terms of the efficiency. The scope of this study focused on the analysis and discussion of the performance evaluation is done through value for money. Issues to be discussed in terms of the efficiency and effectiveness of service programs the procurement of both goods and services in Palembang ULP.

The technique of collecting data through observation, questionnaires, interviews and dokument. Teknis data analysis is a quantitative analysis (Kuantitative Descriptive Analysis Method). Based on data analysis can be summarized as follows: (1) Performance Procurement Services Unit (ULP) Palembang in terms of effectiveness, including effective hand. However, these results have not been satisfactory public, because the objectives have not been realized 100% activity. (2) Performance Procurement Services Unit (ULP) Palembang in terms of the efficiency is very efficient. The percentage of the average efficiency ratio reached 100% and some even beyond ratio above 100%. This means also that the use of the budget for each activity can already be maximized to meet the physical attainment plan (output) in the field.

Key words: Evaluation, Performance Procurement Services Unit (ULP), Palembang.

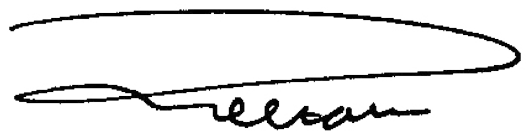
KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan kasih-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan di jurusan akuntansi fakultas ekonomi Universitas Sriwijaya Palembang. Skripsi ini berjudul **“Evaluasi Terhadap Kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Palembang”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masi banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak guna perbaikan dimasa yang akan datang.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, terutama dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasi. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, dan semoga skripsi ini bermanfaat.

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Poltak', with a long horizontal flourish extending to the right.

Poltak Manaek Simamora

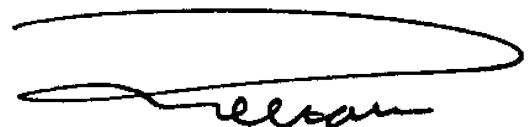
UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, antara lain :

1. Ibu Prof. Dr. Badia Perizade, MBA, Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Ahmad Subeki S.E, M.M, Ak, CA, Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya merangkap anggota Pembimbing Skripsi.
3. Ibu Dr. Inten Meutia, S.E, M.Acc., Ak., CA, Ketua Pembimbing Skripsi.
4. Bapak Drs. Asphani, S.E, M.M, Ak., CA Anggota Pembimbing Skripsi
5. Bapak Drs. H. Harun Delamat, M.Si, Ak., CA, Penguji Skripsi.
6. Ibu Ermadiani, S.E., M.M., CPA, CA., Ak, Pembimbing Akademis
7. Ayah dan Ibu dan seluruh keluarga.
8. Bapak Ir. K. Zulkarnain, Ketua Unit Layanan Pengadaan.
9. Ibu Dra. Wati Purnamasari, Sekretaris Unit Layanan Pengadaan
10. Almamaterku.

Semoga Tuhan membalas budi baiknya dan memberikan berkah kepada kita semua, Amin.

Penulis



Poltak Manaek Simamora

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN ABSTRAK.....	v
PAGE OF ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Organisasi Sektor Publik	10
2.1.1.1 Definisi Organisasi Sektor Publik.....	10
2.1.1.2 Perbedaan Organisasi Sektor Publik dan Sektor Swasta.....	10
2.1.2 Pengukuran Kinerja	11
2.1.2.1 Definisi Kinerja.....	12
2.1.2.2 Definisi Pengukuran Kinerja	12
2.1.2.3 Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik.....	15
2.1.3 Pengadaan	17

2.1.3.1 Konsep <i>Value For Money</i> dalam Pengadaan	19
1. Definisi <i>Value for Money</i>	19
2. Pengukuran <i>Value for Money</i>	20
3. Karakteristik Indikator Kinerja melalui <i>Value for Money</i>	21
4. Langkah–langkah Pengukuran <i>Value for Money</i> ..	22
2.1.4 Aspek yang Dinilai	24
2.1.5 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25
2.6 Penelitian Terdahulu	27
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	29
3.2 Rancangan Penelitian.....	29
3.3 Sumber Data dan Jenis Data	30
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	31
3.5 Teknik Analisis Data.....	33
3.6 Sistematika Pembahasan.....	35
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	37
1. Kelompok Kerja (Pokja) I	37
2. Kelompok Kerja/Pokja II.....	41
3. Kelompok Kerja/Pokja III	44
4. Kelompok Kerja/Pokja IV	47
5. Kelompok Kerja/Pokja V	50
6. Kelompok Kerja/Pokja VI	53
7. Kelompok Kerja/Pokja VII.....	56
4.2 Pembahasan.....	60
 BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan	62
5.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64

LAMPIRAN LAMPIRAN	66
-------------------------	----

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Temuan Awal Permasalahan pada ULP Kota Palembang	5
Tabel 2 Perbedaan Organisasi Sektor Publik dan Sektor Swasta.....	11
Tabel 3 Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	27
Tabel 4 Anggaran Kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) I/Pengadaan Barang.	38
Tabel 5 Distribusi Akumulatif Pernyataan Responden terhadap Kegiatan Program Pokja I.....	40
Tabel 6 Anggaran Kegiatan Pokja II.....	41
Tabel 7 Distribusi Akumulatif Pernyataan Responden Terhadap Pokja II ...	43
Tabel 8 Anggaran Kegiatan Pokja III.....	45
Tabel 9 Distribusi Akumulatif Pernyataan Responden Terhadap Pokja III..	46
Tabel 10 Anggaran Kegiatan Pokja IV	47
Tabel 11 Distribusi Akumulatif Pernyataan Responden Terhadap Pokja IV..	49
Tabel 12 Anggaran Kegiatan Biro Pokja V Tahun 2013	50
Tabel 13 Distribusi Akumulatif Pernyataan Responden Terhadap Pokja V ...	52
Tabel 14 Anggaran Kegiatan Pokja VI	53
Tabel 15 Distribusi Akumulatif Pernyataan Responden Terhadap Pokja VI..	55
Tabel 16 Anggaran Kegiatan Pokja VII.....	56
Tabel 17 Distribusi Akumulatif Pernyataan Responden Terhadap Pokja VII	58
Tabel 18 Rekaiptulasi Pernyataan Responden terhadap Kegiatan Program Pokja I s.d. VII	59
Tabel 19 Pengukuran Value for Money terhadap Kinerja ULP Kota Palembang Tahun Anggaran 2013	60

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Kuesioner	65
2. Jawaban Angket	66
3. Agenda Konsultansi	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Suatu organisasi atau perusahaan pemerintah atau publik dalam pelaksanaan kegiatannya tidak terlepas dari bagaimana kinerja perusahaan untuk bekerja sesuai dengan target yang diinginkan. Dalam kaitannya dengan kegiatan perusahaan atas kinerja, manajemen memerlukan adanya laporan untuk menganalisis aktivitas kinerja tersebut yang mengungkapkan penyimpangan-penyimpangan dari standar atau dari kriteria yang ditetapkan agar segera dapat diambil suatu tindakan perbaikan kualitas kinerja perusahaan dan para pegawai perusahaan. Bagi audit internal untuk melakukan tugas-tugas pemeriksaan terhadap bagaimana Akuntabilitas Publik berjalan pada perusahaan tersebut. Hal ini disebabkan karena bahwa hanya para satuan pengawas internal saja yang dapat menilai bagaimana kinerja yang baik menghasilkan Akuntabilitas yang baik pula, yang sesuai dengan standar yang berlaku di perusahaan dan umum.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja, yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program, atau kegiatan. Dengan kata lain pengukuran kinerja merupakan elemen pokok manajemen berbasis kinerja (Mahmudi, 2007:6). Menurut Gaspersz (2002:68) bahwa pengukuran memainkan peran yang sangat penting bagi peningkatan suatu kemajuan (perubahan) ke arah yang lebih baik.

Fenomena yang sering terjadi pada kebanyakan dari manajer suatu perusahaan yaitu mereka terlalu banyak menghabiskan waktunya pada kegiatan operasional, tetapi sangat disayangkan bila mereka tidak punya waktu sedikitpun untuk membahas strategi perusahaan. Studi yang dilakukan oleh Kaplan dan Norton membuktikan bahwa 85% dari pihak manajemen menghabiskan waktu kurang dari satu jam per bulan untuk membahas strategi. Pembahasan itu pun hanya berfokus pada hal-hal seperti keuangan, penjualan dan inventori semata. Sering kali hal-hal *intangible* luput dari perhatian dan pembicaraan mereka. Pada akhirnya pembahasan tersebut hanya berfokus pada hasil atau capaian mereka (result oriented) dan tidak memberi perhatian cukup terhadap proses (Luis *et.al*, 2007:11).

Begitu pula dalam organisasi pemerintahan, pengukuran kinerja organisasi begitu sangat penting dilakukan. Salah satu cara alat ukur yang dilakukan untuk mengukur kinerja organisasi yaitu dengan menggunakan sistem *value for money*. *Value for money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi *output* yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money*, yaitu: ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan

dan sasaran, terlebih-lebih untuk mengukur kinerja unit layanan pengadaan di ULP Kota Palembang.

Pengadaan merupakan salah satu sumber korupsi terbesar dalam sektor keuangan publik. Setiap tahun, BPK maupun KPK, melaporkan adanya kasus pengadaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi. Tetapi, tidak banyak yang masuk ke persidangan pengadilan. Beberapa kasus pengadaan yang berhasil diselesaikan di pengadilan justru mementahkan legenda bahwa *markup* hanya 30% (Soemitro Djojohadikusumo dalam Tuanakotta, 2006).

Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Palembang sebagai pelaksana teknis di bidang Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan proses dan tugas pengadaan harus memperhatikan etika yang ada dan tetap berpedoman pada standar perilaku yang mencerminkan integritas, independensi, tanggung jawab dan kesungguhan pelakunya. Di samping itu, harus juga mengikuti prinsip-prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

ULP diharapkan menjadi suatu sistem yang dapat merubah proses pengadaan barang/ jasa dari transaksional yang hanya melihat pengadaan sebagai proses administratif dari upaya mendapatkan barang/jasa dengan beberapa pilihan kegunaan dapat dirubah menjadi suatu kegiatan strategis sebagai satu kesatuan yang utuh dan berkesinambungan dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat.

Dalam modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah harus

memperhatikan seluruh aktivitas. Tingkat keberhasilan harus diukur tidak semata-mata kepada input dari program instansi tetapi lebih ditekankan kepada output, proses, manfaat, dan dampak dari program instansi tersebut bagi kesejahteraan masyarakat. Melalui suatu pengukuran kinerja, keberhasilan suatu instansi pemerintah akan lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut berdasarkan sumber daya yang dikelolanya untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah dituangkan dalam perencanaan strategis.

Unit Layanan Pengadaan atau ULP Kota Palembang sampai saat ini masih melekat pada Bagian Pembangunan Kota Palembang. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah disebutkan bahwa ULP dapat berdiri sendiri ataupun melekat pada instansi yang sudah ada, dalam pelaksanaannya, sering terjadi permasalahan dalam proses pengadaan barang/ jasa karena masing-masing anggota ULP yang ada selain bertugas sebagai kelompok kerja di ULP juga bertugas pada kegiatan rutin di SKPD masing-masing. Masalah koordinasi merupakan hal yang sangat penting mengingat adanya dualisme tugas dari anggota kelompok kerja ULP.

Meskipun Pemerintah melalui Kepres Nomor 70 Tahun 2012 sudah berusaha mengatur agar pelaksanaan proses ini dapat berjalan dengan lebih transparan dan akuntabel. Namun di setiap daerah yang diteliti oleh *Transparency International*, secara umum terdapat kesamaan pendapat bahwa proses pengadaan barang/jasa masih sangat rentan terhadap tindak korupsi.

Tidak hanya itu saja, penilaian kinerja terhadap ULP Kota Palembang yang didasarkan atas observasi awal belum menunjukkan hasil yang maksimal. Dari data yang diperoleh ditemui beberapa permasalahan yang terjadi di ULP Kota Palembang. Adapun permasalahan yang ditemui itu dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1
Temuan Awal Permasalahan pada ULP Kota Palembang

No.	Hasil Temuan	Keterangan
1	Perekrutan susunan perangkat ULP Belum merata, yang sebagian besar masih diduduki oleh pegawai dari Dinas PU.	Data diambil dari hasil pengamatan dan wawancara kepada perangkat ULP Kota Palembang
2	Masih terdapat pengeluaran yang kurang ekonomis sehingga menimbulkan pemborosan.	
3	Belum adanya pencapaian target yang harus dicapai pada akhir periode.	

Sumber: Data awal, 2013

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa dari sisi ekonomis dan efisien ULP belum optimal dilakukan. Begitu pula dengan beberapa personil yang terlibat yang mendominasi satu dinas tertentu, hal ini tentu akan berpengaruh terhadap hasil kerja organisasi tersebut. Permasalahan ini tentu saja akan berpengaruh terhadap hasil kinerja organisasi Unit Layanan Pengadaan Kota Palembang.

Menurut Tuanakotta (2006) dalam bukunya yang berjudul *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*, kerangka akuntabilitas untuk pengadaan publik di Indonesia gagal karena cacat dalam beberapa hal, yaitu: 1) Kerangka Hukum Cacat, tidak ada undang-undang pengadaan nasional selain undang-undang

konstruksi (Keppres No. 18/1999). Peraturan Presiden yang mengatur pengadaan di luar konstruksi (Nomor 70 Tahun 2012), walaupun merupakan perbaikan besar dibanding kebijakan-kebijakan sebelumnya, tetap membatasi persaingan yang menuntut persaingan adil antara perusahaan-perusahaan yang setara. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 juga mempunyai kelemahan-kelemahan lain. Ia tidak menyatakan dengan jelas bahwa ia menggantikan peraturan-peraturan presiden sebelumnya. Sebaliknya, beberapa di antara peraturan tersebut masih berlaku. Pemerintah tidak terorganisir untuk menangani pengadaan, pemerintah tidak mengorganisasikan dirinya untuk pengadaan publik, ia tidak memiliki badan yang jelas harus bertanggung jawab untuk kebijakan dan pematuhan pengadaan publik. Insentif-insentif terdistorsi, akibat pamong praja yang dikelola dengan buruk serta peradilan yang lemah, kerangka insentif melenceng jauh sehingga tidak ada imbalan untuk efisiensi dan kejujuran dan tidak ada hukuman untuk korupsi. Baik Pimpro maupun anggota lelang menghadapi insentif-insentif kuat untuk berpartisipasi dalam korupsi dan kolusi. Pengadaan dilakukan di balik pintu tertutup, pengungkapan publik terbatas terhadap proses pengadaan memperkuat insentif-insentif buruk tersebut. Sebagian besar proses tersebut berlangsung di balik pintu tertutup. Hasil-hasil penawaran, berikut pembenaran yang sesuai dengan pemenang penawaran tidak diumumkan. Pengauditan lemah, proses audit, satu-satunya instrumen yang tersedia untuk menegakkan aturan main dan ketentuan-ketentuan seperti telah dicatat, untuk sebagian besar tidak efektif. Efektivitasnya untuk menegakkan praktik-praktik pengadaan yang baik lebih lanjut disesuaikan oleh auditor Pemerintah yang kurang mengenal dengan aturan

dan prinsip pengadaan. Walaupun sekiranya pengauditan itu efektif, sektor peradilan yang tidak berfungsi memastikan bahwa mereka yang menyalahgunakan proses pengadaan tidak akan memikul akibat-akibatnya. Keengganan untuk menerapkan sanksi-sanksi administratif terhadap pegawai negeri yang ketahuan berkolusi dengan lingkaran-lingkaran penawar berarti bahwa secara efektif tidak ada mekanisme penegak.

Mardiasmo (2000), menjelaskan bahwa terdapat beberapa kelemahan audit pemerintahan di Indonesia, yaitu: 1) tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar pengukuran kinerja pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dan hal tersebut umum dialami oleh organisasi sektor publik karena output yang dihasilkan yang berupa pelayanan publik tidak mudah diukur dan 2) berkaitan dengan masalah struktur lembaga audit terhadap pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia, yang overlapping satu dengan lainnya, yang menyebabkan ketidakefisienan dan ketidakefektifan pelaksanaan pengauditan.

Sistem pengadaan publik Indonesia secara luas diyakini merupakan sumber utama bagi kebocoran anggaran, yang memungkinkan korupsi dan kolusi yang memberikan sumbangan besar terhadap kemerosotan pelayanan jasa bagi rakyat miskin Indonesia. Kegagalan tersebut memberikan indikasi bahwa terdapat kegagalan dalam sistem akuntansi dan adanya konflik kepentingan dalam badan organisasi pemerintah. Oleh sebab itu, diperlukan adanya penelitian mendalam mengenai kejadian tersebut dengan cara melakukan riset langsung ke lapangan yakni di ULP Kota Palembang. Dengan ini peneliti mengajukan judul penelitian yaitu Evaluasi terhadap Kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Palembang.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Palembang ditinjau dari sisi efektivitas?
2. Bagaimana kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Palembang ditinjau dari sisi efisiensi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas dapat dicapai tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Palembang ditinjau dari sisi efektivitas.
2. Untuk mengetahui kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Palembang ditinjau dari sisi efisiensi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan mengenai Unit Layanan Pengadaan serta regulasi-regulasi yang berlaku dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah

2. Bagi ULP

Dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran kepada ULP mengenai kelebihan organisasi yang berdiri sendiri dan dikelola secara profesional

terlepas dari aturan yang menyatakan bahwa organisasi ULP dapat berjalan pada instansi yang ada.

3. Bagi Fakultas Ekonomi

Dapat membantu mengembangkan pemikiran pihak-pihak yang berkepentingan dan sebagai tambahan wawasan pengetahuan bagi para pembacanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Dian. 2011. "Evaluasi Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Makassar Melalui Pendekatan *Value for Money*". *Skripsi* dimuat dalam Jurnal Hasanuddin University.
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Ekawarna, Shita Unjaswati, Iskandar Sam, dan Sri Rahayu. 2009. "Pengukuran Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi". *Jurnal Cakrawala Akuntansi*, Volume 1, Nomor 1, Februari 2009. Universitas Negeri Jambi.
- Gaspersz, Vincent. 2002. *Total Quality Management*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hardjomidjojo, Hartisari dan Bimo Bayuaji. 2008. "Analisis Efisiensi Kinerja Industri Tapioka Skala Kecil di Kota Bogor dengan *Fronter Analysis*". Bogor: IPB.
- Kadar Udoyono E-Procurement Dalam Pengadaan barang dan Jasa Untuk Mewujudkan Akuntabilitas di Kota Yogyakarta Jurnal Studi Pemerintahan Volume 3 Nomor 1 Februari 2012
- Luis, Suwardi, dan Biromo, Prima. A. 2007. *Step by Step in Cascading Balanced Scorecard to Functional Scorecards*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Mangkuprawira, Sjafri. 2007. "Kinerja: Apa Itu?" Artikel dimuat di dalam <http://ronawajah.wordpress.com>, diakses tanggal 28 September 2013.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Instansi Pemerintah
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Peraturan Walikota Palembang Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 11 Januari 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/ Jasa Pemerintah Kota Palembang.

Peraturan Walikota Palembang Nomor 2 Tahun 2011 tanggal 11 Januari 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/ Jasa Pemerintah Kota Palembang.

Robbin, S.P. 1996. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Prehallindo.

Sudiarta, K. 2012. “Analisis Realisasi Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Buleleng Melalui Pengukuran *Value for Money*”. *E-Journal Universitas Pendidikan Ganesha*

Tuanakotta, Theodorus M. 2006. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Lembaga Penerbitan FE-UI.

Yuanda, Angel. 2007. “Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik Menggunakan Pendekatan *Value for Money* (Studi Kasus pada Pemerintahan Kota Blitar)”. *Skripsi*. Malang: Universitas Muhammadiyah.